

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- "Hukum dan Sistem Peradilan Pidana"*, Buku Informasi, Modul 2, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)).
- "Indonesia: Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Telah Direvisi"*, diterbitkan oleh Amnesty International Indonesia, September 2006.
- "Judicial Independence In Transitional Countries"*. UNDP, Democratic Governance Fellowship Programme, 2003.
- "Negara Hukum; Panduan Bagi Para Politisi"*, sebuah Positioning Paper, diterbitkan oleh The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and the Hague Institute for the Internationalisation of Law 2012.
- "Laporan Simposium Pembaharuan hukum Pidana Nasional", Jakarta 1980.
- Abraham Blumberg, *"Criminal Justice"*, Published by Burns and MacEachern Ltd, Toronto 1970,
- A. Ridwan Halim, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.V. Dicey, 1915. *"Introduction to the Study of the Law of the Contitution"*, London: Mcmilian.
- A.V. Diecy, 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A Bandung : Nusamedia.
- Achmad Ali, 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*, Makassar: LEPPHAS Unhas.
- , 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Jakarta: Agatama Press.
- , 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2008. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana.
- , 2009. *Diktat Psikologi Hukum; Bahan Ajar Psikologi Hukum* Makassar, Universitas Hasanuddin.

- , 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adji Samekto, 2008. *Justice Not For All*, Yogyakarta: Genta Press.
- Adnan Buyung Nasution, 2007. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- , 2010. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Angkasa, 2010. *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Anthon F. Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asfnawati dan Mas Achmad Santosa, 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Aswanto, 2012. *Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bagir Manan, 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Bahder Johan Nasution, 2015. *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Binziad Kadafi, et al., 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.

- Black, Donald, 1976. *"The Behavior of Law"*, (New York: Department of Sociology, Yale University, New Haven)
- Didik Endro Purwoleksono, 2015. *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga.
- E. Utrecht, 1960. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Press.
- Febiana Rima, 2019. *Fatamorgana Keadilan Hukum Dalam Prinsip The Rule of Law, Pergulatan Etika Indonesia*, Jakarta: Seri Filsafat Atmajaya.
- Gerald Robbers, *An Introduction to German Law*, 2003, 3 th ed 2003.
- Gregor Polancik, *"Empirical Research Method Poster"*. Jakarta: 2009.
- Gustav Radbruch, 1957. *Ikhtisar Lengkap Filsafat Hukum, (Outline of Legal Philosophy)*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada.
- H Muchsin, 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, Depok: STIH IBLAM.
- Harum Pudjianto, 1993. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Herbert Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Calivornia: Stanford University Perss.
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Herman Mostar, 1987. *Peradilan yang Sesat*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J.H. Rapar, 2019. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press.
- J.W. Lapatra, *"Analyzing the Criminal Justice Systems"*, Massachusetts: Lexinton Books, 1978.
- Jimly Ashiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: mandar Maju.
- Kapardis, Andreas, 2014. *“Psychology and Law”*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010. *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Lamintang, 1984. *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Jurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- , 2007. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2014. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papasa Sinar Sinanti.
- Muhammad Nuh, 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung::Pustaka Setia.
- M Sofyan Lubis, 2010. *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Jakarta: Pustaka Yustitia.
- M. Yahya Harahap, 1994. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah.
- , 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1987. *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia.
- , 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Men Rukmini, 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mariam Budiharjo, 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Moh Saleh Djindang, 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- Muhammad Asrun, 2004. *Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, Yogyakarta: Elsam.
- Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi (editor), 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP.
- , 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura, 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Musakkir. *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Notohamidjoyo, dalam Abdul Kadir Muhammad, 1997. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti..
- Ni Nengah Adiyayani. *Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, 2017.
- O.C. Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni.
- Osman Raliby, *Kamus Internasional*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1956).
- Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.

- Paul Sieghart, 1986. *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, New York: Oxford University Press.
- , 1983. *"The International Law of Human Rights"*, Oxford, Clarendo Press, 1983.
- Paulus E. Lotulung, 1993. *Beberapa Sistim tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya.
- Purwoto S. Gandasubrata dikutip di dalam Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct); Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. (Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu.
- R Wiyono, 1982. *Garis Besar Pembahasan dan Komentari UUD 1945*, Bandung: Alumni.
- Radbruch & Dabin, 1990. *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press.
- Rhona K.M. Smith, dkk, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM. UII.
- Riza Nizarli, 2012. *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cetakan kedua, Jakarta: Putra A. Bardin.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi Dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A Bardin.
- , 2010. *Sistem Peradilan Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , "Independensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum", Jakarta: BPHN.

- Rudolf Heimanson, 1967. *Dictionary of Political Science and Law*, Massachuttes: Dobbs Fery Oceana Publication.
- Satjipto Rahardjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- , 1998. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- , 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Siswanto Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Sudikno Mertokusomo, 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surahwardi K Lubis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Grafika.
- The Liang Gie, 2002. *Teori - Teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses.
- Yahya Harahap, 1985. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Zulkarnain, 2006. *Peradilan Pidana*, Malang: MCW danYappika.

Jurnal dan Makalah.

- Abdul Malik. *Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan MK No.005/PUU-IV/2006*. Jurnal Konstitusi. Vol.6. No.2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Anggara dan Sustira Dirga, "*Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*", makalah pada Konferensi Indonesia

Judicial Reform Forum (IJRF) 15 – 16 Januari 2018, Institute for Criminal Justice Reform.

- Ardy Sandro Sonambela. “*Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Kuhap Uu Nomor 8 Tahun 1981*”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI No. 4: 54-61, 2017.
- Bachtiar, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia”, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2381>.
- Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/downloadSuppFile/936/50>
- C. Maya Indah S, “*Refleksi sosial atas Kelemahan hukum Modern, suatu diseminasi hukum tradisional dalam citra hukum Indonesia*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol 103 No. 37 tahun 2008.
- Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, artikel dalam <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/File/181/152>
- Edy Rifai, “*Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi*”, *Jurnal Ilmu Hukum “Praevia”* Fakultas Hukum Unila. Vol. 4. No. 1 tahun 2010.
- Elena Kantorowicz-Reznichenko. 2017. "Misidentification of victims under international criminal law: an attempted offence?." *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 15, No. 2: 291-318.
- Elies Van Sliedregtë “A Contemporary Reflection On The Presumption of Innocence”, *International Review of Penal Law*, Volume 50(2), 2009.
- Esther van Ginneken dan David Hayes. 2017. "'Just' punishment? Offenders' views on the meaning and severity of punishment." *Criminology & Criminal Justice* Vol. 17, No. 1.
- Hasuri, “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.

- ICJ (The International Commission) and Amnesty International, Legal Brief of the Incompatibility of Chilean Decree Law No. 2191 of 1978 with International Law, the Review-ICJ, No. 62-53, 2001, hlm. 161-162.
- Julita Melissa Walukow. *“Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”*. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- I.S. Susanto, “Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial”, dalam Majalah Masalah Hukum Pembangunan No. 9 Tahun 1992.
- M. Syamsudin, *“Faktor-Faktor Sosio-legal yang Menentukan Dalam penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan”*, Jurnal Media Hukum. UMJ. Yogyakarta. 2010.
- Mada Apriandi Zuhir dkk, *“Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia”*, Jurnal Simbur Cahaya Fak Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 26 No 2, Desember 2019.
- Mardjono Reksodiputro, 1993. *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI.
- Pan Mohamad Faiz “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga, *“Prinsip Miranda Rules “The Right To Remain Silent” Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”*, diterbitkan dalam Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019 e- ISSN: 2621-5225.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015, “Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAMP”, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, hlm. 37.
- Ridarson Galingging, *Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*, dimuat dalam Jurnal ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, 2016.
- Sabungan Sibarani. *Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Putusan No. 2161 K/PID/2012*, Jurnal *Justitia et Pax*, Vol 34, No 2: 271-88., 2018.
- The Encyclopedia Americana*, Volume 16, New York: Americana Corporation, 1972.

Untung Wahyudi, “*Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Hukum Pidana Internasional*”, artikel pada Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 26 No 4, Oktober 2008, Fak Hukum Universitas Katolik Atmajaya. Dapat dibaca di: <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&id=150153&src=l>

Victor Tadros and Stephen Tierney, “*The Presumption of Innocence and the Human Rights Act*”, *The Modern Law Review*, Volume 67, Nomor 3, May 2004.

Wiwie Heryani, “*Pendekatan Psikologi Hukum Terhadap Aspek Kesaksian Mata (Eyewitness)*”, artikel dalam Jurnal Amannagappa, Vol.19.No.3. September 2013.

Yonatan Kristiyanto. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona (Studi di Polda Lampung)*, *POENALE: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 6, 2017.

Koran, Internet, Kamus

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/bdab235797398bb7613a0cb31889994d.pdf, data akses 16 September 2020 pukul 21.32 wita.

“Polda DIY Dihukum Bayar Rp 16 Juta Untuk Iwik”, *Republikaonline* (18/06/2014).

“Mereka-mereka yang Jadi Korban Salah Tangkap/Peradilan Sesat” *detiknews.com* (24/11/20-5).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada Jumat, 2 Maret 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada Jumat, 2 Maret 2020.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/imparsial/>, data akses 10 November 2020 pukul 22.05 wita.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/impartial>. data akses 10 November 2020 pukul 22.10 wita.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Impartiality>. data akses 10 November 2020 pukul 22.15 wita.

Atika Mutiara Oktakevina (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung), “Menguji Sisi Imparsial Ombudsman”, artikel di [https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menguji-sisi-imparsial-ombudsman-#:~:text=Wikipedia%20mencatat%20bahwa%20imparsial%20diambil,beruntung%20\(the%20less%20fortunate\)](https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menguji-sisi-imparsial-ombudsman-#:~:text=Wikipedia%20mencatat%20bahwa%20imparsial%20diambil,beruntung%20(the%20less%20fortunate)). Data akses 15 Nopember 2020 pukul 22.25 wita.

https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, data akses Senin 9 Nopember 2020 pukul 21.35 wita.

“Prof. Ramly dan Equality Before the Law”, dimuat pada hukumonline (11/06/2012), dapat dilihat di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i/> data akses Kamis 12 November 2020 pukul 16.50 wita.

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> data akses Jumat 13 November 2020 pukul 20.15 wita.

<https://billofrightsinstitute.org/founding-documents/bill-of-rights/>, data akses 15 September 2020 pukul 21.05 wita.

<https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789>, data akses 15 September 2020 pukul 21.07 wita.

<https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>, data akses 15 September 2020 pukul 21.07 wita

<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, data akses 15 September 2020 pukul 21.15 wita

Black, Henry, 1979, Black’s Law Dictionary, USA : West Group.

“Indonesia: Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Telah Direvisi”, diterbitkan oleh Amnesty International Indonesia, September 2006. Dapat dibaca di: <https://www.amnesty.org/download/Documents/72000/asa210052006in.pdf>.

Eddy OS Hiariej “Memahami Asas Praduga Bersalah dan Tidak Bersalah”, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F16137/Memahami%20Asas%20Praduga.htm>. Data akses 15 Oktober 2020 pukul 22.05 wita.

“Polisi: Kami Akui Ada Kasus Salah Tangkap” Tirto.id (9/07/2018). Lihat juga “Kisah Korban Salah Tangkap yang Disiksa Polisi” Kompas.com (22/06/2017).

“Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi Ke Negara”, <https://www.bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>, 22 Juli 2019.

Media Indonesia, Editorial: *Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas*, Selasa, 9 Desember 2008.

Kompas. *Polri Akui Keliru, Terdakwa Mengaku Disiksa*. 29 Agustus 2008.

Kompas, *Hakim Bebaskan Sugik*. 18 Desember 2008.

Suparman Marzuki “Independensi dan Imparsialitas Hakim”, artikel di Koran TEMPO (21/07/2017).

Putusan

Putusan Nomor: 1036/Pid/ B/2008/ PN. DPK.

Putusan Nomor: 56/Pid.Prap/2011.PN Jakarta Selatan..

Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016

Putusan Nomor: 89 PK/PID/2008 dan

Putusan Nomor: 90 PK/PID/2008

Putusan PN Jombang Nomor: No. 48/Pid.B/2008/- PN.JMB.

Putusan PN Jombang Nomor. 49/Pid.B/2008/- PN.JMB.

Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Peraturan Perundang-undangan

1. UUD NRI Tahun 1945 pascaamandemen;
2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. UU No 2 Tahun 2002 tentang POLRI;
5. UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia);
UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR)